
**PENGARUH DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AGENCY
COST PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI
BURSA EFEK INDONESIA**

Davin Fortino Tionatan
email: davinfortinotionatan@gmail.com

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap *agency cost* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 29 perusahaan dan diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan. Bentuk penelitian ini adalah *correlational research*, penelitian kuantitatif, penelitian kausalitas. Pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020 melalui *website* resmi tiap perusahaan. Data dianalisis dengan program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini adalah dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *agency cost*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *agency cost*. Kemampuan variabel independen menjelaskan *agency cost* sebesar 34,44 persen. Saran untuk penelitian masa depan adalah menambah atau mengganti variabel independen, proksi variabel dependen dapat ditambah, serta menambah sampel penelitian. Saran untuk perusahaan adalah pemanfaatan dewan komisaris dan komite audit, peningkatan kepemilikan manajerial.

Kata kunci: *agency cost*, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *good corporate governance*.

PENDAHULUAN

Setiap pemegang saham berharap mendapatkan manfaat atas investasinya. Demi mencapai hal tersebut, perusahaan berusaha untuk bekerja secara efisien dan efektif untuk menekan biaya yang ada tanpa mengurangi nilai dan kualitas yang diperoleh. Menjual saham dan meminjam dana dilakukan perusahaan demi memenuhi kekurangan dana yang dibutuhkan perusahaan. Ada kalanya dana yang didapat tidak cukup untuk memenuhi pembelian aset, pembayaran hutang, dan pembiayaan operasional perusahaan sehingga perusahaan kesulitan memberikan manfaat yang diharapkan oleh pemegang saham atas dana yang telah diinvestasikannya.

Agency cost muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan pemilik sehingga terdapat asimetri informasi yang menguntungkan agen. Masalah keagenan muncul ketika manajer selalu bertindak demi kepentingan pribadi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengendalikan masalah keagenan disebut *agency cost* yang meliputi biaya *monitoring* (pengawasan), biaya *bonding* (penjamin tindakan manajemen), dan biaya *residual loss* (biaya kerugian seperti hutang dan kebangkrutan).

Dewan komisaris merupakan pihak yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk menjalankan fungsi pengawasan agar manajemen tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka semakin mudah untuk mengendalikan manajemen perusahaan. Pengawasan terhadap manajemen dilakukan agar aktivitas yang dilakukan manajemen berjalan secara efektif dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit internal. Efektifnya fungsi komite audit menyebabkan kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan dapat diminimalkan.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer juga memiliki peran dalam perusahaan sebagai pemegang saham. Manajer yang dimaksud merupakan dewan direksi dan dewan komisaris. Manajer sebagai pemegang saham dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga dapat mengurangi munculnya masalah keagenan dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi eksternal. Kepemilikan institusional berperan sebagai pengendali eksternal manajemen yaitu mengawasi berjalannya perusahaan dengan memastikan manajemen tidak melakukan tindakan yang menguntungkan manajemen secara sepihak. Semakin besar kepemilikan institusional mengakibatkan adanya efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan pemborosan yang dilakukan oleh manajer.

Penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap *agency cost* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian antar peneliti. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan periode tahun, variabel penelitian, dan objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Agency Cost* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia”.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Agency cost*

Jensen & Meckling (1976: 308) berpendapat bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara pihak pertama dengan pihak lainnya dimana pihak pertama meminta orang lain yang berperan sebagai agen untuk melakukan pekerjaan jasa dari separuh pekerjaan mereka termasuk mendelegasikan wewenang membuat keputusan kepada agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen & Meckling (1976: 313), masalah agensi yang disebabkan karena masalah kepentingan antara prinsipal dengan agen dan adanya asimetris informasi. Menurut Jensen & Meckling (1976: 308), *agency cost* terdiri dari:

- a. *The monitoring expenditures by the principle*. Biaya *monitoring* dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan perilaku agen. Biaya pengawasan oleh prinsipal seperti: biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakkan peraturan atau kebijakan peraturan khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, dan biaya terkait ekuitas pihak luar.
- b. *The bonding expenditures by the agent*. *The bonding cost* dikeluarkan oleh prinsipal untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal. Biaya ini juga sering disebut dengan biaya pengikatan oleh prinsipal. Biaya pengikatan ini seperti: biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait *covenant* dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi.

c. *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya hubungan keagenan. Kerugian residual yang mungkin ada seperti: resiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan.

Menurut Faisal (2005: 181), *agency cost* dapat diukur berdasarkan tingkat perputaran aset (*asset turnover*). Tingkat perputaran aset merupakan rasio antara total penjualan dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset oleh manajemen. Semakin tinggi rasio ini maka semakin produktif aset tersebut digunakan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Menurut McKnight & Weir (2008: 141), rasio penjualan terhadap aset yang tinggi mengindikasikan aset digunakan secara efektif yang juga meminimumkan *agency cost*. Rasio perputaran aset yang rendah berarti manajemen perusahaan mengimplikasikan kebijakan yang tidak efektif dan efisien. Rendahnya rasio ini mengindikasikan tingginya *agency cost* dan penggunaan aset yang tidak efisien dan efektif.

2. Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan terdapat empat yaitu dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 1 menyatakan “dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum serta memberi nasihat kepada direksi.” Kebijakan yang bersifat strategis dan penting menjadi perhatian dewan komisaris. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, “komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan menyatakan independensinya pada RUPS dan independensi tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.” Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 bab III pasal 20, dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang dan satu diantaranya merupakan komisaris independen. Komisaris independen wajib paling kurang tiga puluh persen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota komisaris diselenggarakan pada saat RUPS.

Menurut Wijayati (2015: 4), dewan komisaris yang melaksanakan fungsi *monitoring* terhadap kebijakan direksi diharapkan dapat meminimumkan masalah keagenan antara dewan direksi dengan pemegang saham yang juga sejalan dengan *agency cost*. Menurut Sanjaya & Christianti (2012: 114-115), semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka akan membantu menguatkan hubungan antara manajemen dengan pemegang saham serta dapat menjadi tempat berkonsultasi terkait strategi perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi *agency cost* secara negatif.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Sanjaya & Christinati (2012: 116), serta Noveliza (2020: 68) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *expense ratio* (meminimumkan *agency cost*). Selain itu, penelitian Krisnauli & Hadiprajitno (2014: 8) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *asset turnover ratio* (meminimumkan *agency cost*). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *asset turnover ratio* (meminimumkan *agency cost*).

3. Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen karena merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dengan perusahaan serta antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Kep-643/BL/2012 menyatakan bahwa “masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.” Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa “komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit serta terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.”

Menurut Linda et. al. (2020: 54), dewan komisaris dan komite audit dapat menjembatani kepentingan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Keberadaan

dewan komisaris dan komite audit dalam komposisi tata kelola perusahaan dapat memperkuat pengawasan. Menurut Haryanto & Yanto (2018: 238), semakin tinggi jumlah komite audit dapat meminimalisir masalah keagenan karena pengawasan menjadi lebih efektif.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Noveliza (2020: 68), serta Linda et. al. (2020: 59) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *expense ratio* (meminimalkan *agency cost*). Selain itu, penelitian Haryanto & Yanto (2018: 243), serta Alam (2021: 47) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *asset turnover ratio* (meminimalkan *agency cost*). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komite audit berpengaruh positif terhadap *asset turnover ratio* (meminimalkan *agency cost*).

4. Kepemilikan Manajerial

Menurut Christiawan & Tarigan (2007: 2), kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau manajer juga berperan sebagai pemegang saham perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976: 345), salah satu cara mengurangi konflik antara prinsipal dan agen adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan sehingga mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen serta manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Menurut Christiawan & Tarigan (2007: 2), agen (manajer) diberi wewenang oleh prinsipal (pemilik) untuk menjalankan bisnis demi kepentingan prinsipal. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan.

Menurut Ross, Westerfield, & Jordan (2003: 14), semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut Handoko (2014: 227), adanya kepemilikan saham manajerial memungkinkan adanya penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham sehingga semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan juga dirinya sendiri sehingga akan menurunkan *agency cost* perusahaan tersebut.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Mcknight & Weir (2009: 151), Wijayati (2015: 13), serta Candradewi & Sedana (2016: 3182) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *asset turnover ratio* (meminimalkan *agency cost*). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *asset turnover ratio* (meminimalkan *agency cost*)

5. Kepemilikan Institusional

Menurut Handoko (2014: 227), kepemilikan institusional yaitu keadaan di mana institusi (baik pihak swasta maupun pemerintah) memiliki saham dalam suatu perusahaan. Investor institusional (bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan dana pensiun) memiliki motivasi lebih tinggi untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan dibanding investor perorangan karena mereka memiliki andil yang lebih besar.

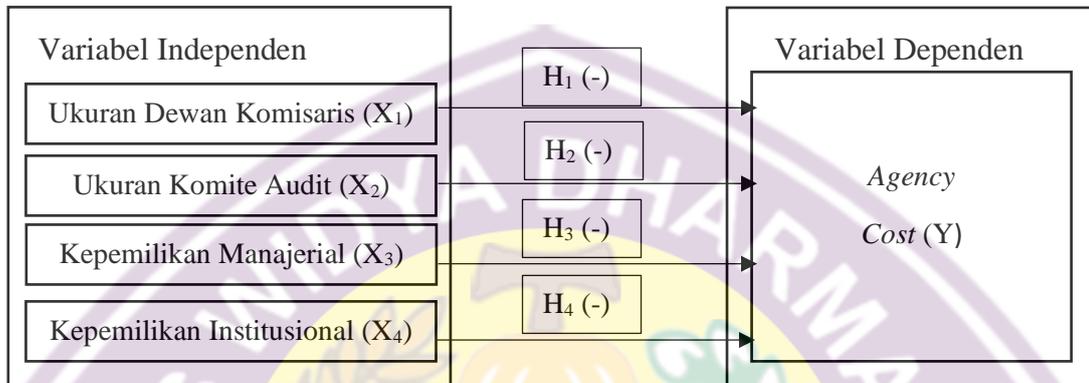
Menurut Brickley, Lease, & Smith (1988: 267-268), pertumbuhan kepemilikan institusional telah meningkatkan perhatian bagaimana investor institusional mempengaruhi pasar modal dan tindakan korporasi. Menurut Brickley, Lease, & Smith (1988: 284), investor institusional cenderung aktif dalam mencegah pengambil alihan perusahaan dibanding pemegang saham lainnya dan mereka cenderung menolak pengajuan peraturan yang merugikan pemegang saham. Jensen & Meckling (1976: 313) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Noveliza (2020: 68) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *expense ratio* (meminimalkan *agency cost*). Selain itu, penelitian Mcknight & Weir (2009: 151), Wijayati (2015: 12-13), serta Candradewi & Sedana (2016: 3182) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *asset turnover ratio* (meminimalkan *agency cost*).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *asset turnover ratio* (meminimalkan *agency cost*).

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka maka hubungan antara variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Pengaruh dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap *agency cost*

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Industri ini dipilih karena memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Bentuk penelitian ini adalah penelitian asosiatif/*correlational research* yaitu penelitian statistik dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yaitu meneliti sampel/populasi dengan pengambilan sampel dengan kriteria penelitian untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Penelitian ini termasuk penelitian kausalitas karena meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020 melalui *website* resmi tiap perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman berjumlah total 29 perusahaan yang *listing* hingga tahun 2022. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan yang *listing* selama tahun 2016 hingga tahun 2020 dan melampirkan data mengenai variabel

independen penelitian secara lengkap yaitu sebanyak 17 perusahaan. Tahun yang diteliti sebanyak 5 tahun sehingga total sampel penelitian adalah sebanyak 85 sampel.

Menurut Handoko (2014: 237), dewan komisaris merupakan jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris. Menurut Haryanto & Yanto (2018: 240), komite audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Menurut Handoko (2014: 236-237), kepemilikan manajerial diukur dari jumlah saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar, sedangkan kepemilikan institusional diukur dari jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Menurut Faisal (2005: 181), *agency cost* dapat diukur dengan *asset turnover ratio* yaitu rasio antara total penjualan dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset oleh manajemen yang digunakan.

PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	85	,33	,50	,3806	,06905
Komite Audit	85	0	4	2,81	,699
Kepemilikan Manajerial	85	,0000	,5799	,076939	,1557824
Kepemilikan Institusional	85	,1888	,9201	,618665	,2094032
<i>Agency cost</i>	85	,1403	3,1048	1,037382	,6106175

Sumber: Data Olahan, 2022

Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 85 sampel. Dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 0,33, nilai maksimum sebesar 0,5, *mean* sebesar 0,3806, dan standar deviasi sebesar 0,06905. Komite audit memiliki nilai minimum sebesar nol, nilai maksimum sebesar empat, *mean* sebesar 2,81, dan standar deviasi sebesar 0,699. Kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar nol, nilai maksimum sebesar 0,5799, *mean* sebesar 0,076939, dan standar deviasi sebesar 0,1557824. Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,1888, nilai maksimum sebesar 0,9201, *mean* sebesar 0,618665, dan standar deviasi sebesar 0,2094032. *Agency cost* yang diprosikan dengan *asset turnover ratio* memiliki nilai minimum sebesar 0,1403,

nilai maksimum sebesar 3,1048, *mean* sebesar 1,037382, dan standar deviasi sebesar 0,6106175.

2. Uji asumsi klasik

Tabel 2
Hasil pengujian asumsi klasik

Variabel	Uji normalitas	Uji heteroskedastisitas	Uji multikolinearitas		Uji autokorelasi
	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<i>Collinearity Statistics</i> <i>Tolerance</i>	VIF	Durbin-Watson
Dekom	0,2	0,611	0,785	1,274	1,853
Komdit		0,864	0,755	1,324	
Kepman		0,137	0,580	1,724	
Kepinst		0,474	0,597	1,676	

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 2, data terdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Seluruh variabel independen tidak mengalami masalah heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Seluruh variabel independen tidak mengalami masalah multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari sepuluh. Data tidak mengalami masalah autokorelasi karena memenuhi kriteria yaitu $d_u < d < 4-d_u = 1,7210 < 1,853 < 2,147$

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Hasil uji analisis regresi linear berganda

Variabel	Koefisien regresi	Signifikansi	Variabel	Koefisien regresi	Signifikansi
Konstanta	-0,841	0,132	Kepman	2,680	0,000
Dekom	0,938	0,291	Kepinst	2,130	0,000
Komdit	-0,001	0,993			

Sumber: Data Olahan, 2022

Agency cost diprosikan dengan rasio perputaran aset yang bertolak belakang dengan arah *agency cost* maka diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$AC = 0,841 - 0,938 \text{ Dekom} + 0,001 \text{ Komdit} - 2,680 \text{ Kepman} - 2,130 \text{ Kepinst} + \varepsilon$$

Keterangan:

AC = *Agency cost*

Dekom	= Dewan komisaris
Komdit	= Komite audit
Kepman	= Kepemilikan manajerial
Kepinst	= Kepemilikan institusional
ε	= <i>Error term</i>

4. Hasil uji hipotesis

Tabel 4
Hasil uji hipotesis

Variabel	Koefisien Determinasi	Uji F	Uji t	
	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	t	<i>Sig.(2-tailed)</i>
Dekom	0,344	0,000	-2,648	0,100
Komdit			-1,014	0,314
Kepman			6,005	0,000
Kepinst			7,115	0,000

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,344 menunjukkan bahwa kemampuan dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional menjelaskan *agency cost* sebesar 34,4 persen dan sisanya 65,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian layak untuk diteliti.

Dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,100, komite audit memiliki nilai signifikansi 0,314 maka dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *agency cost*. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 maka kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *agency cost*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *agency cost*. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *agency cost* dengan koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar -2,680 dan kepemilikan institusional sebesar -2,130.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang memengaruhi *agency cost* hanya sebesar 34,4 persen dan sampel penelitian merupakan empat persen

dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saran untuk penelitian di masa mendatang adalah peneliti dapat menambah atau mengganti variabel independen yang diteliti, menambah proksi dari variabel dependen, dan menambah sampel penelitian yang diteliti. Saran untuk perusahaan adalah meningkatkan pemanfaatan tata kelola perusahaan terutama dewan komisaris dan komite audit, dan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, J. P. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agency Cost Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan. (2012). *KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal.
- Brickley, J. A., Lease, R. C., & Smith, Jr., C. W. (1987). Ownership Structure and Voting on Antitakeover Amendments. *Journal of Financial Economics* 20, 267-291.
- Candradewi, I. & Sedana, I. B. P. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen terhadap Return on Asset. *E-Jurnal Manajemen Unud Vol.5 No.5*, 3163-3190.
- Christiawan, Y. J., & Tarigan, J. (2007). Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 9, No 1*, 1-8.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak.
- Faisal. (2005). Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 8(2), 175-190.
- Handoko, J. (2014). Pengaruh Struktur Modal Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Agency Cost Perusahaan LQ45 di Bei Tahun 2013. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014*, 226-253.
- Haryanto, S. P. & Yanto, J. (2018). Peran Mekanisme Corporate Governance Dalam Memitigasi Agency Costs. *Studi Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 232-249.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.

-
- Krisnauli & Hadiprajitno, P. B. (2014). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2), 1-13.
- Linda, Afrianandra, C., Fitria, A., & Yulia, A. (2020). Factors Affecting Performance in Companies with High Agency Costs.” *Journal of Accounting Research, Organization and Economics* 3(1), 52-61.
- McKnight , P. J., & Weir, C. (2009). *Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance* No. 49,139–158.
- Noveliza, D. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran KAP, Ukuran Dewan Komisaris dan Leverage Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur (Industri Barang Konsumsi) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. *Mediastima*, 26(1), 53-83.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W. & Jordan, B. D. (2002). *Fundamentals of Corporate Finance Alternate Edition: Sixth Edition*. New York: McGraw Hill Education.
- Sanjaya, I P., & Christianti, I. (2012). Corporate Governance and Agency Cost: Case in Indonesia. *2nd International Conference on Business, Economics, Management and Behavioral Sciences*, 112-118.
- Wijayati, F. L. (2015). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Biaya Keagenan. *Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan* Vol.6 No.2, 1-16.